

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa **penerapan protokol kesehatan belum dilaksanakan dengan baik oleh PKL di Jalan Pramuka dan Jalan Taman Galaxy** karena masih ditemukannya pelanggaran penerapan protokol kesehatan oleh PKL selama berjualan di masa pandemi. Ketidaktepatan tidak semata-mata hanya karena kurangnya kesadaran PKL akan pentingnya penerapan protokol kesehatan, tetapi juga karena faktor pengawasan yang kurang oleh Satpol PP dan ketidaktepatan sanksi yang diberikan kepada PKL sebagai pelanggar protokol kesehatan.

Berikut kesimpulan dari analisis keenam faktor Weaver yang melandasi ketidaktepatan PKL di Kecamatan Bekasi Selatan khususnya di Jalan Pramuka dan Jalan Taman Galaxy terkait penerapan protokol kesehatan:

1. Insentif dan Sanksi

Tidak terdapat insentif yang diberikan kepada PKL yang mematuhi protokol kesehatan. Satpol PP belum memberikan sanksi secara tegas sesuai dengan Perda No. 15 Tahun 2020 kepada PKL yang melanggar. Selama ini hanya diberikan himbauan dan teguran.

2. Pengawasan

Satpol PP belum mengintensifkan pengawasan secara rutin kepada PKL yang berada di Jalan Pramuka maupun Jalan Taman Galaxy.

Pengawasan hanya dilakukan 2-3 kali dalam seminggu, bahkan Satpol PP pernah tidak memberikan pengawasan sama sekali dalam seminggu.

3. Sumberdaya

Satpol PP masih kekurangan sumberdaya yaitu personil Satpol PP untuk melakukan pengawasan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana lainnya sudah cukup memadai.

4. Otonomi

Belum adanya asosiasi PKL di kedua daerah tersebut. Sehingga faktor ini belum relevan untuk melihat ketidakpatuhan PKL dalam melakukan protokol kesehatan

5. Informasi

Pihak Satpol PP telah memberikan informasi terkait protokol kesehatan melalui sosialisasi langsung dan media (cetak dan elektronik). Pemerintah juga sudah memasang spanduk-spanduk peringatan protokol kesehatan 5M di Jalan Pramuka dan Jalan Taman Galaxy.

6. Sikap dan Keyakinan

Sikap PKL dalam merespon kebijakan protokol kesehatan masih kurang. Beberapa PKL meyakini bahwa penerapan protokol kesehatan yang ketat dapat mengurangi penyebaran virus, tetapi untuk menerapkannya mereka masih mengalami kesulitan karena faktor-faktor seperti ketidaknyamanan menggunakan masker selama berjualan dan keterbatasan anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan yang tepat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran peneliti agar terciptanya kepatuhan PKL terhadap penerapan protokol kesehatan 5M adalah sebagai berikut:

1. Satpol PP perlu memberikan sanksi yang lebih tegas bahkan sanksi berat seperti pemberhentian operasional sementara, denda, bahkan tidak diperbolehkan berjualan kembali di daerah tersebut agar memberikan efek jera kepada PKL yang melanggar
2. Pemberian insentif kepada PKL yang rutin mematuhi protokol kesehatan 5M.
3. Satpol PP perlu memberikan pengawasan secara rutin setiap hari dengan melakukan pemantauan atau sekedar patroli ke daerah-daerah ramai PKL yang sering ditemukan pelanggaran protokol kesehatan seperti di Jalan Pramuka dan Jalan Taman Galaxy. Dengan begitu PKL akan merasa diawasi setiap harinya.
4. Pemerintah bersama dinas terkait dapat melakukan pengawasan dengan pemasangan kamera pengawas/cctv di tempat-tempat ramai PKL agar dapat menindak para pelanggar dengan mudah
5. Pemerintah bersama dinas terkait perlu memberikan bantuan masker bahkan *handsanitizer* gratis kepada PKL untuk mendukung kepatuhan protokol kesehatan
6. Pemberian jadwal berjualan bagi PKL agar tidak terjadinya kerumunan terutama di Jalan Pramuka yang menjadi alun-alun Kota Bekasi

7. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi bahwa ketika individu sudah di vaksin bukan berarti tidak perlu menerapkan protokol kesehatan, karena vaksin bukanlah obat. Sehingga tetap perlu diterapkan protokol kesehatan 5M secara ketat setelah dilakukannya vaksinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Afiranti, N., Rahmiati, C. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19*. Jurnal Ilmiah Permas: 2021
- Bruce L. Berg and Howard Lune. 2012. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. 8th ed. USA: Pearson.
- Hasanah, H. *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*. Jurnal at-Taqaddum, 2016.
- Iqbal, H. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002)
- Lintang, A.S. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gva Media, 2012.
- OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), *Reducing the Risk of Policy failure: Challenges for Regulatory Compliance*, Amerika Serikat: Universitas Michigan, 2000.
- Ripley, R. et al. *Policy Implementation and Bureaucracy*, The Dorsey Press: Chicago, Illinois, 1986.
- Sandelowski, M. (2004). *Qualitative Research*, in Lewis-Beck, M., Bryman, A., and Liao, T (eds) *The Sage Encyclopedia of Social Science Research Methods*, Thousand Oaks CA, Sage.
- Silalahi, U. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Solichin Abdul Wahab, 1997. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Penerbit FIA. UNIBRAW dan IKIP Malang
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*
- Sulaiman, L., Sastrawan, S., Kamariyah, S., Menap, M. *Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melaksanakan Protokol Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes: 2021

Taufiqurokhan. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014.

Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983.

Weaver, R. K. "Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation", *Issues in Government Studies*, 27 (2009): 3-7

Winarno, B. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014.

Dokumen

Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.339-BPBD/N/2020 tentang Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Melawan Covid-19 Di Kota Bekasi

Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Surat Edaran Nomor: 556/273/SET.COVID-19 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Upaya Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi Pada Sektor Jasa Usaha Kepariwisata, Hiburan dan Perdagangan (Area Publik) di Kota Bekasi

Website

Ediyanto, "*Kebijakan Publik*", diakses melalui : <http://s2.stiami.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/KEBIJAKAN-PUBLIK.pptx>

Humas UGM, "*Peran Sektor Informal Di Indonesia*", diakses melalui [ugm.ac.id : https://ugm.ac.id/id/berita/1756-peran-sektor-informal-di-indonesia](https://ugm.ac.id/id/berita/1756-peran-sektor-informal-di-indonesia)

Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif", diakses melalui [uin-malang.ac.id:https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html](https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html)

Sholih Muadi, “*Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*”, diakses melalui Jurnal Review Publik : <file:///C:/Users/HP/Downloads/1078-Article%20Text-3765-2-10-20190930.pdf>

Suprpto, A. Abdul Malik, “*Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)*”, diakses melalui Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada: <https://media.neliti.com/media/publications/283267-implementasi-kebijakan-diskresi-pada-pel-23f8f2f8.pdf>